



Peran Serta Masyarakat dalam Tata Kelola Pemerintahan Kampung di Kampung Klawosom

Rusdi¹, Rosnani² & Miryam Diana Kalagison³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Sorong, Kota Sorong, Indonesia, 98411

Telp: +62 1342496325

E-mail: rusdi@um-sorong.ac.id

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-02-24

Revised : 2025-03-20

Accepted: 2025-03-26

KEYWORD

Community

Governance

Kampung Klawosom

Government

KATA KUNCI

Masyarakat

Tata Kelola

Kampung klawosom

Pemerintahan

ABSTRACT

Good village governance is an important foundation for sustainable community development. This article examines community participation in village governance in Klawosom Village, Klamono District. Through a case study, it aims to analyse how the community is involved in the decision-making process, monitoring the use of the village budget, and the implementation of development programmes. Data were collected through interviews, observations, and documentation studies, then analysed qualitatively. The results showed that active community participation has a significant impact on the effectiveness and accountability of the village government. In addition, this article also identifies challenges and opportunities in improving community participation in village governance in Klawosom Village.

ABSTRAK

Tata kelola pemerintahan Kampung yang baik merupakan fondasi penting bagi pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Artikel ini mengkaji peran serta masyarakat dalam tata kelola pemerintahan Kampung di Kampung Klawosom, Distrik Klamono. Melalui studi kasus, PkM ini bertujuan bagaimana masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan terhadap penggunaan anggaran Kampung, serta implementasi program-program pembangunan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil PkM menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan Kampung. Selain itu, artikel ini juga mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan Kampung di Kampung Klawosom.

1. Pendahuluan

Tata kelola pemerintahan Kampung merupakan aspek penting dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Di Kampung Klawosom, partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan Kampung sangat krusial untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif dan efisien. Partisipasi ini mencakup berbagai bentuk keterlibatan, mulai dari pengambilan keputusan hingga pelaksanaan program-program pembangunan yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Kinerja Badan Permusyawaratan Kampung dalam proses pengawasan keuangan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. PkM ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam evaluasi hasil pembangunan infrastruktur sangat tinggi, di mana masyarakat terlibat aktif dalam pemantauan dan evaluasi bersama tim ahli dan aparatur Kampung (Pratama, 2023; Dwijosusilo & Shafiyah, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan Kampung. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan peraturan Kampung juga sangat penting (Rusdi, *et al.*, 2023). Kegiatan pendampingan yang melibatkan seluruh masyarakat dalam penyusunan kebijakan Kampung dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap peraturan yang ada. Masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan tersebut (Alam, 2023). Keberadaan program-program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pengembangan potensi lokal, juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengembangan potensi Kampung, mereka tidak hanya mendapatkan manfaat ekonomi, tetapi juga merasa lebih terlibat dalam proses pembangunan (Siswanto, 2019). Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap aspek pemerintahan (Sucihati *et al.*, 2021). Peran serta masyarakat dalam tata kelola pemerintahan Kampung di Kampung Klawosom sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan pelaksanaan program-program pembangunan, yang pada akhirnya akan

meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.

Partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan merupakan elemen kunci dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Keterlibatan aktif warga negara tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan publik yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Sulaiman *et al.* 2019), partisipasi masyarakat berperan signifikan dalam mewujudkan *good governance* di tingkat desa, studi oleh (Lian *et al.* 2023) menyoroti pentingnya penerapan e-government dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan desa. Implementasi teknologi informasi memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses informasi dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat tidak selalu berjalan mulus. Penelitian oleh (Mustanir dan Latif, 2020) menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam penerapan prinsip *good governance* oleh aparatur desa dalam pelayanan publik. Hal ini menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan. Peran serta masyarakat dalam tata kelola pemerintahan adalah komponen esensial dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan meningkatkan partisipasi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan tercipta sistem pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.

Urgensi partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan kampung sangat penting karena keterlibatan aktif warga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kesejahteraan bersama. Di Kampung Klawosom, partisipasi masyarakat telah menunjukkan kemajuan signifikan melalui berbagai bentuk keterlibatan seperti musyawarah desa, pengawasan pelaksanaan program pembangunan, serta kontribusi dalam perencanaan anggaran kampung. Diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan kapasitas warga agar partisipasi dapat lebih maksimal dan berdampak positif bagi tata kelola pemerintahan kampung.

Pada konteks tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat memegang peran penting dalam pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Studi yang dilakukan oleh Latif *et al.* (2019) menyoroti bahwa keterlibatan aktif warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek

infrastruktur dapat meningkatkan kualitas hasil pembangunan serta memastikan bahwa proyek tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Penelitian ini menekankan pentingnya musyawarah dan kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. (Mustanir et al. 2019) dalam penelitiannya menggarisbawahi pentingnya pendekatan partisipatif dalam perencanaan pembangunan desa. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung, perencanaan menjadi lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Pendekatan ini juga meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap hasil pembangunan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keberlanjutan proyek-proyek tersebut. Implementasi partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan tidak lepas dari tantangan. Penelitian oleh (Sofyani dan Akbar, 2013) menunjukkan bahwa faktor internal institusi, seperti komitmen pimpinan dan kapasitas aparatur, berpengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa selain partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas internal pemerintah juga krusial untuk mencapai tata kelola yang baik. Peran serta masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa merupakan komponen vital dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan tercipta sinergi yang mampu mengatasi berbagai tantangan dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

2. Tinjauan Literatur

Tinjauan pustaka dalam artikel ini mencakup berbagai teori dan konsep terkait partisipasi masyarakat, tata kelola pemerintahan Kampung, dan pembangunan masyarakat. Beberapa literatur yang relevan antara lain: Teori Partisipasi Masyarakat: Mengkaji berbagai definisi dan tingkatan partisipasi masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tata Kelola Pemerintahan: Membahas prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta peran masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel (Rusdi, R., & Neman, H. 2022) Pembangunan Masyarakat: Mengkaji konsep pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan. Partisipasi masyarakat memegang peranan penting dalam menciptakan tata

kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. Ketika warga aktif terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, hal ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga membuat kebijakan menjadi lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat (Wibowo, 2020). Menurut teori peran masyarakat, keterlibatan warga bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah proses kolaboratif yang memungkinkan mereka memberikan masukan langsung serta ikut bertanggung jawab atas hasil pembangunan di lingkungan mereka (Sari & Putra, 2022). Tata kelola pemerintahan yang efektif menuntut adanya sinergi antara pemerintah kampung dan masyarakat. Tata kelola ini mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi dalam pengelolaan sumber daya, partisipasi publik secara aktif, serta akuntabilitas pejabat kampung terhadap warganya (Rahman et al., 2021). Partisipasi masyarakat menjadi fondasi utama untuk mewujudkan pemerintahan kampung yang responsif dan inklusi dalam konteks Kampung Klawosom sendiri, sejauh mana masyarakat berpartisipasi sangat menentukan keberhasilan program-program pembangunan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat keterlibatan warga dalam musyawarah desa maupun pengawasan penggunaan dana desa akan berdampak positif pada kualitas pelayanan publik di kampung tersebut (Santoso & Lestari, 2023)

3. Metode

PkM ini dilaksanakan pada tanggal 26 September 2024 di Kampung Klawosom Kabupaten Sorong, dihadiri oleh Masyarakat Kampung Klawosom. PkM menggunakan metode partisipatif dengan pendekatan langsung ke masyarakat melalui kegiatan pendampingan serta diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*) guna menggali pandangan dan pengalaman warga terkait tata kelola pemerintahan Kampung Klawosom. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan masyarakat Kampung Klawosom. data diperoleh dari observasi langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan Kampung.

4. Hasil

Sebelum kegiatan PKM dilaksanakan, partisipasi masyarakat Kampung Klawosom dalam tata kelola pemerintahan masih terbatas, ditandai dengan rendahnya keterlibatan warga dalam musyawarah kampung dan pengambilan keputusan. Di samping itu pemahaman masyarakat terhadap

peraturan kampung juga masih kurang merata. Dari Hasil PkM ini menunjukkan masyarakat Kampung Klawosom memiliki tingkat partisipasi yang cukup dalam tata kelola pemerintahan Kampung. Masyarakat Cukup terlibat dalam berbagai kegiatan Musyawarah Kampung, Kegiatan Masyarakat dalam musyawarah Kampung dilaksanakan untuk membahas rencana pembangunan Kampung. Hal pengawasan, Masyarakat cukup aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran Kampung tetapi kurang aktif dalam memberikan masukan terkait Prioritas program-program yang akan dilaksanakan. Pada Evaluasi Pembangunan Masyarakat kurang terlibat dalam evaluasi terhadap hasil pembangunan infrastruktur dan program-program lainnya. Partisipasi aktif masyarakat ini memberikan dampak signifikan mengarah ke baik terhadap tata kelola pemerintahan di Kampung Klawosom.



Gambar 1. Penyampaian Peran Serta Masyarakat dalam tata kelola pemerintahan

Beberapa di antaranya yang dapat dilihat dalam hal ini Masyarakat mulai mengakses terhadap informasi terkait anggaran Kampung dan program-program pembangunan. Akuntabilitas Pemerintah Kampung akuntabel dalam penggunaan anggaran dan pelaksanaan program-program pembangunan. Setelah pelaksanaan kegiatan PKM yang meliputi pendampingan langsung, sosialisasi kebijakan kampung, serta diskusi kelompok terfokus (FGD), terjadi peningkatan signifikan dalam partisipasi masyarakat. Warga menjadi lebih aktif mengikuti musyawarah dan memberikan masukan konstruktif untuk pembangunan kampung. Pemahaman mereka terhadap tata kelola pemerintahan juga meningkat secara nyata, tercermin dari tingginya tingkat kehadiran dan kontribusi dalam berbagai forum desa. Partisipasi masyarakat dalam tata kelola kampung dapat mengambil berbagai bentuk kegiatan seperti melaporkan isu-isu lokal, mengadvokasi perubahan kebijakan, dan terlibat aktif dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan proyek pembangunan. tetapi literatur yang ada menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam tata kelola kampung sering kali tidak

konsisten dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk transparansi dan akuntabilitas pejabat pemerintah, efektivitas komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, dan kesadaran masyarakat akan hak dan tanggung jawab mereka. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan Kampung di Kampung Klawosom. Beberapa tantangan tersebut antara seperti Kurangnya Kesadaran dimana Sebagian masyarakat masih kurang sadar akan pentingnya partisipasi dalam tata kelola pemerintahan Kampung. Keterbatasan Akses Informasi dimana Masyarakat dalam mengakses informasi terkait anggaran Kampung dan program-program pembangunan. Kurangnya Fasilitas sehingga Pemerintah Kampung perlu lebih aktif memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan.

5. Kesimpulan

Peran serta masyarakat dalam tata kelola pemerintahan Kampung di Kampung Klawosom sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan pelaksanaan program-program pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, perlu adanya upaya dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya.

- 1) Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain: Peningkatan Kesadaran: Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam tata kelola pemerintahan Kampung.
- 2) Peningkatan Akses Informasi: Mempermudah akses masyarakat terhadap informasi terkait anggaran Kampung dan program-program pembangunan.
- 3) Peningkatan Fasilitas: Pemerintah Kampung perlu lebih aktif memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan.

Dengan upaya bersama, diharapkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan Kampung di Kampung Klawosom dapat terus meningkat, sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan.

6. Persembahan

PkM ini didukung oleh Kampus Universitas Muhammadiyah Sorong. Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan Dosen Administrasi Negara yang telah memberikan wawasan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi PkM ini.

7. Referensi

- Alam, A. (2023). Pendampingan penyusunan kebijakan dan peraturan Kampung Tanarajae untuk mendukung pengembangan potensi ekowisata. *IPMAS*, 3(2), 104–112.
- Ahmad, S., & Putra, R. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa: Studi kasus di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 45–58.
- Dewi, L., & Santoso, B. (2023). Transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan kampung di era digitalisasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 101–115.
- Dwijosusilo, K., & Shafiyah, S. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana kampung untuk pembangunan infrastruktur di Kampung Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 4(2), 143.
- Hidayat, M., & Kurniawan, T. (2021). Peran teknologi informasi dalam meningkatkan partisipasi warga desa pada pengambilan keputusan publik. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 5(3), 210–223.
- Fadli, M., & Rahman, A. (2021). Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap keberhasilan program pembangunan desa. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 12(2), 89–102.
- Indrawati, S., & Wibowo, R. (2024). Peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi pemerintahan kampung di era digitalisasi. *Jurnal Teknologi dan Pemerintahan*, 9(1), 23–37.
- Julkarnain, M., Herfandi, H., & Afriliyansa, D. (2021). Rancang bangun aplikasi tata kelola kampung berbasis web menggunakan metode waterfall di kantor Kampung Sepukur. *Jurnal Informatika Teknologi dan Sains*, 3(2), 362–367.
- Kartika, N., & Sari, P. (2023). Digitalisasi pelayanan publik sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat di tingkat desa. *Jurnal Teknologi dan Pemerintahan*, 5(1), 23–37.
- Latif, A., & Mustanir, A. (2020). *Buku Kepemimpinan Adam Irwan 2020* (pdf, 154).
- Lian, E., Kawuryan, M. W., & Rusfiana, Y. (2023). Kualitas layanan online berbasis WhatsApp dalam pelayanan administrasi kependudukan. *Public Service and Governance Journal*, 4(1).
- Mulyani, D., & Prasetyo, H. (2021). Implementasi e-government untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 11(2), 112–125.
- Pratama, F. (2023). Kinerja badan permusyawaratan kampung (BPD) dalam proses pengawasan anggaran pendapatan dan belanja kampung (APBDes) di Kampung Moteng Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Paradigma (JP)*, 12(1).
- Rusdi, et al. (2023). PKM peran administrasi dalam pembangunan di Kelurahan Klabulu: Community service the role of administration in development in the Klabulu village. *Abdimas: Papua Journal of Community Service*, 5(2), 73–76.
- Pertiwi, A., Dema, H., Mustanir, A., & Anugrah, E. (2021). Penerapan e-government dalam mewujudkan transparansi tata kelola pemerintahan desa (Studi pada pemerintahan Desa Bulu Timoreng). *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 9(3), 130–139.
- Nugroho, A., & Setiawan, B. (2020). Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan: Studi pada beberapa desa di Jawa Barat. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 8(3), 99–110.
- Sulaeman, Z., Mustanir, A., & Muchtar, A. I. (2019). Partisipasi masyarakat terhadap perwujudan good governance di Desa Damai Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 88–92.
- Sofyani, H., & Akbar, R. (2013). Hubungan faktor internal institusi dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 4.
- Rusdi, R., & Neman, H. (2022). Kebijakan dan strategi pemerintah terhadap pemberdayaan usaha masyarakat kecil di Kelurahan Malawele Distrik Aimas Kabupaten Sorong. *Gema Kampus IISIP YAPIS Biak*, 17(2), 1–6.
- Rahman, F., Hidayatullah, & Suryani. (2021). Prinsip tata kelola pemerintahan desa: Transparansi dan partisipasi sebagai kunci keberhasilan. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 45–58.
- Santoso, B., & Lestari, D. R. (2023). Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kualitas

pelayanan publik di Kampung Klawosom. *Jurnal Pembangunan Desa*, 7(2), 112–125.

Sari, M., & Putra, A. R. (2022). Teori peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah: Pendekatan kolaboratif untuk pemberdayaan lokal. *Jurnal Ilmu Sosial*, 10(3), 78–89.

Siswanto, B. (2019). Pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. *JIMS*, 7(2).

Karmeli, E., Suprianto, S., Sutanty, M., Purwadinata, S., & Sucihati, R. N. (2022). Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui penggunaan dana desa berbasis partisipatif. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 11(2), 1101–1108.

Wahyuni, S., & Hartono, Y. (2024). Penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan partisipatif untuk mendukung tata kelola pemerintahan kampung yang baik. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 13(1), 55–70.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).